

RINGKASAN

Isyca Ramanda Putri 220510212 **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA
PENGUMPULAN DATA BIOMETRIK TANPA
PERSETUJUAN PEMILIK DATA DALAM ERA
KECERDASAN BUATAN
(Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum dan Eko Gani PG, S.H.,
M.H.)**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah mengatur data biometrik sebagai data pribadi spesifik yang pemrosesannya harus memiliki dasar hukum yang sah, termasuk persetujuan dari subjek data. Namun, dalam praktiknya sistem kecerdasan buatan dapat mengumpulkan dan memproses data biometrik secara otomatis dan masif tanpa persetujuan yang jelas. Keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang seharusnya berlaku dengan realitas pemrosesan data biometrik dalam sistem digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap pengumpulan data biometrik tanpa persetujuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta bentuk pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP telah memberikan dasar hukum terhadap pelindungan data biometrik melalui Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 20. Namun, pengaturan tersebut belum mengatur secara rinci standar persetujuan biometrik, penggunaan teknologi pengenalan wajah, pemrosesan data untuk pelatihan algoritma, serta pengawasan terhadap pemrosesan biometrik otomatis dalam sistem kecerdasan buatan.

Pengumpulan data biometrik tanpa persetujuan yang jelas dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Selain itu, Pasal 12 UU PDP juga memberikan hak kepada subjek data pribadi untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi.

Kata Kunci: Data Biometrik, Kecerdasan Buatan, Persetujuan, Pertanggungjawaban Perdata, Perbuatan Melawan Hukum.

SUMMARY

**Isyca Ramanda Putri
220510212**

**LEGAL ANALYSIS OF CIVIL LIABILITY FOR
THE COLLECTION OF BIOMETRIC DATA
WITHOUT CONSENT IN THE CONTEXT OF
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
(Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum dan Eko Gani PG, S.H.,
M.H.)**

Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection recognizes biometric data as specific personal data whose processing must be based on a lawful basis, including the consent of the data subject. However, in practice, Artificial Intelligence systems are capable of collecting and processing biometric data automatically and on a massive scale without clear consent from data subjects. This condition demonstrates a gap between legal norms and the reality of biometric data processing in digital systems.

This study aims to analyze the legal framework governing biometric data collection without consent under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and to examine the forms of civil liability arising from such conduct under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were obtained through library research and analyzed qualitatively.

The results show that the Personal Data Protection Law provides legal protection for biometric data through Article 4 paragraph (2) and Article 20. Nevertheless, the regulation has not comprehensively addressed standards for biometric consent, the use of facial recognition technology, biometric data processing for algorithm training, and supervisory mechanisms for automated biometric processing in Artificial Intelligence systems.

The collection of biometric data without valid consent may give rise to civil liability under Article 1365 of the Indonesian Civil Code if the elements of an unlawful act are fulfilled, namely the existence of an act, unlawfulness, fault, damage, and a causal relationship. Furthermore, Article 12 of the Personal Data Protection Law grants data subjects the right to claim compensation for violations related to personal data processing.

Keywords: *Biometric Data, Artificial Intelligence, Consent, Civil Liability, Unlawful Act.*